

SKRIPSI

**ARAHAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
BERDASARKAN PRINSIP PERMUKIMAN
BERKELANJUTAN
(STUDI KASUS: RW 01 DAN RW 02, KELURAHAN
BONTORANNU, KECAMATAN MARISO)**

Disusun dan diajukan oleh:

**AYUMI FATILLAH CAMARA PUTRI
D101 191 020**



**PROGRAM STUDI SARJANA PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
2024**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ARAHAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PRINSIP PERMUKIMAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: RW 01 DAN RW 02, KELURAHAN BONTORANNU, KECAMATAN MARISO)

Disusun dan diajukan oleh

Ayumi Fatillah Camara Putri
D101 191 020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah
dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Ir. Mimi Arifin, M.Si.
NIP 196612181993032001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Wiwik Wahidah Osman, ST., MT.
NIP 196810222000032001

Ketua Program Studi,



Dr.Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si
NIP 19741006 2008 12 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ayumi Fatillah Camara Putri

NIM : D101191020

Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Arahan Penataan Permukiman Kumuh Berdasarkan Prinsip
Permukiman Berkelanjutan
(Studi Kasus: RW 01 dan RW 02, Kelurahan Bontorannu,
Kecamatan Mariso)**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan, yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi, yang akan dipublikasi oleh Penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 06 Maret 2024

Yang Menyatakan



Ayumi Fatillah Camara Putri



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AYUMI FATILLAH CAMARA PUTRI. *Arahan Penataan Permukiman Kumuh Berdasarkan Prinsip Permukiman Berkelanjutan (Studi Kasus: RW 01 Dan RW 02, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)* (dibimbing oleh Mimi Arifin dan Wiwik Wahidah Osman)

RW 01 dan RW 02 yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, merupakan permukiman yang termasuk ke dalam kriteria permukiman kumuh. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar yang berpengaruh besar pada kondisi kualitas permukiman ini, menjadikan kawasan ini belum memenuhi kriteria permukiman sesuai dengan kriteria permukiman berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui karakteristik permukiman kumuh pada RW 01 dan RW 02, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, (2) mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan pada permukiman kumuh pada RW 01 dan RW 02, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dan (3) menyusun arahan penataan permukiman kumuh pada RW 01 dan RW 02, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan prinsip permukiman berkelanjutan. Lokasi penelitian ini adalah permukiman yang terletak di RW 01 dan RW 02, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis *Multidimensional Scalling* (MDS) dan analisis spasial serta metode kualitatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu (1) lokasi penelitian memiliki tingkat kepadatan bangunan sangat tinggi yang didominasi oleh bangunan permanen, dengan mata pencaharian masyarakatnya mayoritas merupakan buruh harian dan didominasi oleh lulusan SMA dan masih ada infrastruktur dasar yang tidak memenuhi standar. (2) faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan permukiman ialah peluang usaha, tingkat pendidikan masyarakat, sistem sanitasi, ketersediaan TPS, dan keberadaan karang taruna. (3) arahan penataan permukiman pada lokasi penelitian yaitu berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah berbasis usaha rumah tangga; pengadaan IPAL; pengadaan TPS; dan mengaktifkan karang taruna.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Berkelanjutan, Kelurahan Bontorannu



ABSTRACT

AYUMI FATILLAH CAMARA PUTRI. *Direction of Slum Settlement Arrangement Based on Sustainable Settlement Principles (Case Study: RW 01 and RW 02, Bontorannu Village, Mariso District)* (supervised by Mimi Arifin and Wiwik Wahidah Osman)

RW 01 and RW 02 located in Bontorannu Urban Village, Mariso Subdistrict, Makassar City, are settlements that are included in the slum criteria. The lack of basic infrastructure, which has a major effect on the quality of these settlements, makes this area not yet meet the criteria for settlements in accordance with the criteria for sustainable settlements. This study aims to (1) determine the characteristics of slums in RW 01 and RW 02, Mariso Subdistrict, Makassar City, (2) determine the factors that affect the level of sustainability in slums in RW 01 and RW 02, Mariso Subdistrict, Makassar City, and (3) develop directions for structuring slums in RW 01 and RW 02, Mariso Subdistrict, Makassar City based on sustainable settlement principles. The location of this research is settlements located in RW 01 and RW 02, Bontorannu Village, Mariso Subdistrict, Makassar City. The research method in this study uses quantitative methods with Multidimensional Scalling (MDS) analysis techniques and spatial analysis and qualitative methods with qualitative descriptive techniques. The results of the study are (1) the research location has a very high building density level dominated by permanent buildings, with the majority of people's livelihoods being day laborers and dominated by high school graduates and there is still basic infrastructure that does not meet the standards. (2) The factors that most influence the sustainability of settlements are business opportunities, community education levels, sanitation systems, availability of TPS, and the existence of youth organizations. (3) The direction of settlement arrangement at the research location is in the form of economic empowerment of the lower middle class community based on household businesses; procurement of IPAL; procurement of TPS; and activating youth organizations.

Keywords: Slum Settlement, Sustainability, Bontorannu Village



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
KATA PENGANTAR	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1.5.1 Lingkup Substansi.....	3
1.5.2 Lingkup Wilayah.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman.....	5
2.2 Permukiman Kumuh.....	6
2.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh.....	7
2.2.2 Faktor Timbulnya Permukiman Kumuh.....	11
2.2.3 Aspek dan Kriteria Kekumuhan.....	12
2.2.4 Pendekatan Penanganan Permukiman Kumuh.....	12
2.3 Pembangunan Permukiman Berkelanjutan.....	14
2.4 Analisis <i>Multidimensional Scaling</i> (MDS).....	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.6 Kerangka Konsep.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Perencanaan Data.....	32
3.4 Populasi dan sampel.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39



3.7	Variabel Penelitian.....	40
3.8	Definisi Operasional.....	40
3.9	Kerangka Penelitian.....	41

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum	44
4.1.1	Gambaran Umum Kota Makassar.....	44
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Mariso.....	46
4.1.3	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.2	Analisis Karakteristik Permukiman Pada RW 01 dan RW 02, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.....	49
4.2.1	Kondisi Fisik Permukiman.....	49
4.2.2	Kondisi Non-Fisik Permukiman.....	63
4.3	Analisis Faktor yang Paling Mempengaruhi Tingkat Keberlanjutan Permukiman Kumuh pada RW 01 dan RW 02.....	71
4.3.1	Dimensi Ekonomi.....	72
4.3.2	Dimensi Sosial Budaya.....	74
4.3.3	Dimensi Lingkungan.....	76
4.3.4	Dimensi Infrastruktur.....	79
4.3.5	Dimensi Kelembagaan.....	81
4.4	Arahan Penataan Permukiman Kumuh pada RW 01 dan RW 02 Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan Permukiman Berkelanjutan	83
4.4.1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelas Menengah Kebawah Berdasarkan Home Industry.....	83
4.4.2	Pengadaan Bank Sampah pada Permukiman Kumuh di RW 01 dan RW 02, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso	84
4.4.3	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).....	88
4.4.4	Penyediaan Gerobak Sampah.....	88
4.4.5	Pengadaan Kelompok Karang Taruna	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

LAMPIRAN	100
-----------------------	-----

CURRICULUM VITAE	106
-------------------------------	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahap analisis menggunakan MDS.....	23
Gambar 2	Kerangka konsep penelitian.....	27
Gambar 3	Peta lokasi penelitian skala kota.....	29
Gambar 4	Peta lokasi penelitian skala kecamatan.....	30
Gambar 5	Peta lokasi penelitian.....	31
Gambar 6	Peta sebaran sampel lokasi penelitian.....	37
Gambar 7	Kerangka penelitian	43
Gambar 8	Peta administrasi Kota Makassar.....	45
Gambar 9	Peta administrasi Kecamatan Mariso.....	47
Gambar 10	Peta wilayah penelitian.....	48
Gambar 11	Diagram kondisi fisik bangunan lokasi penelitian.....	50
Gambar 12	Peta sebaran kondisi fisik bangunan pada lokasi penelitian.....	51
Gambar 13	Peta sarana kesehatan lokasi penelitian.....	53
Gambar 14	Peta sarana pendidikan.....	54
Gambar 15	Peta radius sarana pelayanan.....	55
Gambar 16	Kondisi jalan lingkungan pada lokasi penelitian dengan perkerasan <i>paving block</i>	56
Gambar 17	Kondisi lebar jalan di lokasi penelitian; (a) lebar 1 m; (b) lebar 2,5 m.....	56
Gambar 18	Kondisi sistem persampahan pada lokasi penelitian; (a) tumpukan sampah di pinggir kanal; (b) tumpukan sampah pada lahan kosong; (c) motor pengangkut sampah; (d) sampah pada saluran drainase.....	57
Gambar 19	Jaringan air bersih; (a) mesin air PDAM; (b) penampung air pada rumah warga.....	58
Gambar 20	Peta kondisi lebar jalan pada lokasi penelitian.....	59
Gambar 21	Sistem sanitasi pada lokasi penelitian; (a) pembuangan air limbah tanpa perencanaan yang baik (b) pembuangan air limbah langsung ke kanal.....	60
Gambar 22	Peta kondisi persampahan lokasi penelitian.....	61
Gambar 23	Peta kondisi sanitasi lokasi penelitian.....	62
Gambar 24	Diagram mata pencaharian penduduk yang sudah bekerja di atas 18 tahun.....	64
Gambar 25	Diagram data penghasilan masyarakat pada lokasi penelitian.....	65
Gambar 26	Tingkat pendidikan akhir masyarakat di lokasi penelitian.....	66
Gambar 27	Kegiatan gotong royong antar warga pada lokasi penelitian; (a) gotong royong warga; (b) kerja bakti.....	67
Gambar 28	Alur layanan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak...	68
Gambar 29	Keberadaan lembaga sosial pada lokasi penelitian.....	68
Gambar 30	Tanda rumah penerima bantuan.....	69



Gambar 31	Jalan <i>paving block</i> penanganan kumuh.....	70
Gambar 32	Tingkat keberlanjutan dimensi ekonomi.....	73
Gambar 33	Analisis <i>leverage</i> dimensi ekonomi.....	74
Gambar 34	Nilai keberlanjutan dimensi sosial budaya.....	75
Gambar 35	Analisis <i>leverage</i> dimensi sosial budaya.....	76
Gambar 36	Status keberlanjutan dimensi lingkungan.....	77
Gambar 37	Analisis <i>leverage</i> dimensi lingkungan.....	78
Gambar 38	Status berkelanjutan dimensi infrastruktur.....	79
Gambar 39	Analisis <i>leverage</i> dimensi infrastruktur.....	80
Gambar 40	Status berkelanjutan dimensi kelembagaan.....	81
Gambar 41	Analisis <i>leverage</i> dimensi kelembagaan.....	82
Gambar 42	Pelatihan bidang kuliner.....	84
Gambar 43	Keberadaan sampah plastik pada lokasi penelitian: (a) sampah plastik yang tertumpuk pada lahan kosong; (b) sampah plastik yang tertumpuk di atas air.....	85
Gambar 44	Peta rencana Bank Sampah Unit (BSU) pada lokasi penelitian	87
Gambar 45	Skema sistem pengelolaan IPAL komunal rumah tangga	88
Gambar 46	Ilustrasi gerobak sampah kecil	89
Gambar 47	Ilustrasi gerobak sampah	90
Gambar 48	Peta rencana gerobak sampah dan jalur motor sampah pada lokasi penelitian	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Aspek dan kriteria kekumuhan.....	12
Tabel 2	Penerapan aspek berkelanjutan dalam penanganan permukiman kumuh.....	17
Tabel 3	Konsep permukiman berkelanjutan dari berbagai literatur.....	19
Tabel 4	Kategori tingkat keberlanjutan.....	22
Tabel 5	Penelitian terdahulu.....	24
Tabel 6	Kebutuhan data.....	32
Tabel 7	Variabel penelitian.....	42
Tabel 8	Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Makassar.....	44
Tabel 9	Luas Wilayah dan jumlah penduduk menurut kelurahan di Kecamatan Mariso.....	46
Tabel 10	Klasifikasi kepadatan bangunan.....	49
Tabel 11	Kondisi fisik bangunan lokasi penelitian.....	50
Tabel 12	Mata pencaharian penduduk yang sudah bekerja di atas 18 tahun....	63
Tabel 13	Data penghasilan masyarakat pada lokasi penelitian.....	64
Tabel 14	Tingkat pendidikan akhir masyarakat di lokasi penelitian.....	66
Tabel 15	Perbedaan bantuan dana pada program bedah rumah.....	70
Tabel 16	Kategori tingkat keberlanjutan.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	99
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	101
Lampiran 3 Perhitungan.....	103



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Arahan Penataan Permukiman Kumuh Berdasarkan Prinsip Permukiman Berkelanjutan (Studi Kasus: RW02 dan RW 03, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam beserta keluarga, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jajarannya.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum terpenuhinya infrastruktur dasar yang berpengaruh besar pada kondisi kualitas permukiman kumuh pada kawasan penelitian dan belum terpenuhinya kriteria permukiman sesuai dengan target SDGs yang ke-11 yaitu permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berupa bentuk arahan penataan permukiman dengan prinsip permukiman berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari penelitian ini karena keterbatasan ilmu dan kekurangan yang dimiliki. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca. Terima kasih.

Gowa, 18 September 2023

Ayumi Fatillah Camara Putri

Sitasi dan Alamat Kontak:

Ayumi Fatillah Camara Putri (2023). *Arahan Penataan Permukiman Kumuh Berdasarkan Prinsip Permukiman Berkelanjutan (Studi Kasus: RW 01 dan RW 03, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso).* **Skripsi Program Studi S1 Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin, Makassar**



Demi peningkatan kualitas skripsi ini, maka kritik dan saran dapat dikirimkan ke melalui alamat email berikut ini: ayumifatillah@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala berkat, rahmat, dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi berjudul “Arahan Penataan Permukiman Kumuh Berdasarkan Prinsip Permukiman Berkelanjutan (Studi Kasus: Rt 002 Dan Rt 003, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)” disusun untuk memperoleh gelar sarjana program studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi dan dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak (Rustan Tappa) dan Ibu (Jenny Erawati) serta Kakak (Aimi Fajirah) dan Adik (Anita Fahrani) yang selalu memberikan bantuan, doa, motivasi, serta restu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.) atas segala bentuk kebijakan dan kepemimpinannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT.) atas segala bentuk dukungan dan kebijakannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
4. Kepala Departemen Departemen Prodi S1-Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si.) dan Sekretaris Departemen Prodi S1-Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Sri Aliyah Ekawati, ST., MT.) atas arahan, bimbingan, motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Utama (Dr. Ir. Mimi Arifin, M.Si.) yang telah meluangkan dan telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran sejak sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.



6. Dosen Pembimbing Pendamping (Dr. Wiwik Wahidah Osman, ST., MT.) yang telah meluangkan waktu dan telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran sejak awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Kepala Studio Akhir (Dr.techn. Yashinta K. D. Sutopo, ST., MIP) yang telah meluangkan waktu dan telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran sejak awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yang telah membimbing dan membantu penulis sejak dari awal masuk perkuliahan hingga lulus.
9. Teman-teman seperjuangan PWK Sektor 2019 atas segala canda, tawa, bantuan, dan pengalaman berharga yang telah penulis dapatkan.
10. Teman-teman di *Labo Based Education* (LBE) Perumahan dan Permukiman atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini serta memberikan doa dan motivasi, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Pada akhirnya, diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi pengembang dunia pendidikan.

Gowa, September 2023

(Ayumi Fatillah Camara Putri)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia sebagai makhluk hidup ialah tempat tinggal atau permukiman. Dalam hal ini, manusia akan berusaha menyewa atau memiliki tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Pemenuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia dimaksudkan agar manusia memiliki tempat untuk berlindung, berteduh, dan memiliki rasa aman dan nyaman. Selain sebagai *basic need* manusia, perumahan dan permukiman juga berfungsi dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi masa depan (Asa, 2015). Dalam pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, masih banyak kendala yang dihadapi oleh beberapa kalangan masyarakat sehingga mereka belum dapat memenuhi kebutuhan ini secara layak. Sehingga menyebabkan munculnya permukiman-permukiman kumuh di perkotaan, yang memicu masyarakat dalam memadatkan hunian dan mengakibatkan tumbuhnya permukiman kumuh di perkotaan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, permukiman kumuh merupakan permukiman tidak layak huni dengan kepadatan bangunan sangat tinggi dalam daerah terbatas, kualitas umum bangunan buruk, serta tidak terlayani sarana dan prasarana lingkungan yang berakibat pada keberlangsungan penghuni. Ketidakberhasilan upaya penanganan permukiman kumuh juga disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek non-fisik, seperti pembinaan manusia dan pembinaan ekonomi, yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (Rama dkk, 2018).

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman salah satunya ialah untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan u dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, elanjutan. Di sisi lain, adanya urgensi dalam penanganan permukiman ung ada di seluruh dunia, sekaligus menjadi salah satu sasaran dalam SDGs



nomor 11 untuk membentuk kota dan komunitas yang berkelanjutan, menjadikan pentingnya upaya untuk mengatasi permasalahan ini.

Sejalan dengan isu permasalahan permukiman kumuh di atas, terdapat permasalahan terkait pembangunan permukiman perkotaan di Kota Makassar, diantaranya yaitu masih terdapatnya daerah-daerah permukiman kumuh yang belum tertata dengan baik, masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di rumah-rumah sederhana yang kurang layak. Kota Makassar menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatannya sangat tinggi yaitu sebesar 7.188 jiwa/km² dan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 1.432.189 jiwa (BPS, 2022). Sama halnya dengan kawasan perkotaan pada umumnya, Kota Makassar juga menjadi salah satu kota besar yang banyak didatangi oleh penduduk pendatang yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh dengan berbagai masalah lingkungan fisik dan kondisi sosial budaya ekonomi penduduknya. Berdasarkan SK Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1301/050.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar, diketahui bahwa Kota Makassar memiliki lebih dari 90 kelurahan dan sekitar 329 RT yang tergolong kumuh.

Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso tepatnya di RW 01 dan RW 02, merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar yang termasuk ke dalam kategori kumuh (SK Kumuh Walikota Makassar, 2021). Permasalahan utama munculnya permukiman kumuh pada kawasan ini dikarenakan belum terpenuhinya infrastruktur dasar yang berpengaruh besar pada kondisi kualitas permukiman pada wilayah ini. Hal ini juga menjadikan kawasan permukiman ini belum memenuhi kriteria pemukiman berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat topik ini sehingga dapat diketahui arahan penataan untuk mengatasi permukiman kumuh pada permukiman di RW 01 dan RW 02 dengan prinsip permukiman berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:



1. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh pada RW 01 dan RW 02, Kelurahan Mariso, Kota Makassar?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan permukiman pada RW 01 dan RW 02, Kecamatan Mariso, Kota Makassar?
3. Bagaimana arahan penataan permukiman kumuh pada RW 01 dan RW 02, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan prinsip permukiman berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh pada RW 01 dan RW 02, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan pada permukiman kumuh RW 01 dan RW 02, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Untuk menyusun arahan penataan permukiman kumuh pada RW 01 dan RW 02, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan prinsip permukiman berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyebab yang mengakibatkan timbulnya permukiman kumuh.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya menentukan bentuk penyelesaian permukiman kumuh di perkotaan.
3. Bagi Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian lanjutan di bidang perumahan dan permukiman khususnya di bidang permukiman kumuh..

1.5 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan substansi.



Lingkup Substansi

Ruang lingkup ini secara umum terkait dengan lingkup materi yang dibahas penelitian ini, yaitu:

1. Karakteristik permukiman pada permukiman kumuh RW 01 dan RW 02, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
2. Penjabaran faktor yang paling mempengaruhi tingkat keberlanjutan permukiman berdasarkan indikator berkelanjutan pada permukiman kumuh RW 01 dan RW 02, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Penyusunan arahan penataan permukiman yang sesuai dengan karakteristik lokasi penelitian dan faktor yang paling mempengaruhi keberlanjutan permukiman pada permukiman kumuh RW 01 dan RW 02, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan prinsip permukiman berkelanjutan.

1.5.2 Lingkup Wilayah

Wilayah studi penelitian adalah permukiman yang terletak di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berada pada permukiman kumuh yang terletak di RW 01 dan RW 02.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini mengikuti struktur yang terdiri dari beberapa bagian yang mencakup latar belakang hingga kesimpulan. Sistematika penulisan disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian, peraturan, dan juga penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, variabel penelitian, definisi operasional, dan kerangka penelitian.

BAB IV Analisis dan Pembahasan berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian serta mengenai data-data yang akan dianalisis dan juga menampilkan hasil analisis data sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V Penutup berisi mengenai kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian dan n untuk penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman

Definisi permukiman berdasarkan Kamus Tata Ruang tahun 2007 permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung kehidupan sehingga fungsinya dapat berdaya guna. Sedangkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, menjelaskan pengertian perumahan dan permukiman dalam beberapa pengertian.

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Dalam UU No. 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan, terutama bagi MBR.



3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan
4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Parwata (2004), menjelaskan bahwa permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya. Selain itu, Parwata (2004) menjelaskan bahwa permukiman terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Isi, yaitu manusia itu sendiri;
2. Wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia.

2.2 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi standar (Anindita, 2021). Didukung oleh pendapat Wijaya (2019), bahwa permukiman kumuh adalah permukiman padat penduduk yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan hidup dan kehidupan penghuninya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, dan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak



terlayani prasarana lingkungan yang memadai, dan membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya. Standar indikator petunjuk pelaksanaan penilaian tingkat kekumuhan permukiman dikondisikan dalam lima aspek menurut Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan Direktorat Pengembangan Permukiman (2006), yaitu:

1. Kondisi lokasi, dengan indikator status legalitas lahan, status penggunaan kekuasaan lahan, frekuensi terjadinya bencana kebakaran, dan frekuensi terjadinya bencana tanah longsor.
2. Kondisi kependudukan, menggambarkan tingkat kepadatan penduduk yang berada di kawasan kumuh untuk menilai tingkat kekumuhannya dengan indikator tingkat kepadatan penduduk, rata-rata anggota rumah tangga, jumlah KK per rumah, dan tingkat pertumbuhan penduduk.
3. Kondisi bangunan, dengan indikator tingkat kualitas struktur bangunan, tingkat kepadatan bangunan, tingkat kesehatan dan kenyamanan bangunan, tingkat penggunaan luas lantai bangunan.
4. Kondisi sarana dan prasarana, merupakan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum dasar yang ada pada kawasan kumuh, sehingga penilaian yang dilakukan yaitu tentang layak atau tidaknya dan jumlahnya yang telah memenuhi syarat atau belum
5. Kondisi sosial ekonomi, dengan indikator meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kerawanan keamanan.

2.2.1 Karakteristik Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh timbul dengan karakteristik yang selalu berkesan negatif. Beberapa ciri daerah kumuh menurut Aeny (2014), antara lain:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi;
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau memproduksi subsiten yang hidup dibawah garis kemiskinan;

h yang ada di daerah ini merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan dan tidak layak;



4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang kotordan mudah tersebar penyakit menular;
5. Langkanya pelayanan kota seperti air bersih, fasilitas MCK, listrik, dsb;
6. Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus 16;
7. Kuatnya gaya hidup perdesaan yang masih tradisional;
8. Secara sosial terisolasi dari permukiman lapisan msyarakat lainnya;
9. Ditempati secara illegal atau status hukum tanah yang tidak jelas Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

Karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol adalah kualitas bangunan rumah yang tidak permanen, dengan kerapatan bangunan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang sangat terbatas (berupa gang sempit yang berliku), tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah (Salma, 2019). Sedangkan ciri-ciri kekumuhan menurut Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

1. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
2. Ketidak lengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum;
3. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
4. Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Karakteristik permukiman kumuh juga dilihat dari dua aspek yaitu karakteristik fisik dan karakteristik non-fisik

1. Karakteristik Fisik

Berdasarkan Permen PU Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, karakteristik permukiman kumuh dapat dilihat melalui:

a. Kondisi Bangunan



ndisi bangunan pada karakteristik permukiman kumuh mencakup raturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas i yang tidak memenuhi syarat.

b. Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi jalan lingkungan pada permukiman kumuh terbagi menjadi dua bagian yaitu jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan, sedangkan untuk kualitas permukaan jalan lingkungan buruh merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

c. Ketersediaan Air Minum

Penyediaan air minum mencakup ketersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. Ketersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan permukiman yang tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

d. Kondisi Drainase Lingkungan

Karakteristik kekumuhan yang ditinjau dari drainase lingkungan mencakup drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidakterediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya, dan kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Ketersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan



dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku yaitu tian air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman yang tidak

memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

f. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan tidak memadai sebagai berikut, tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan, gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

g. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran dan sarana proteksi kebakaran. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan, jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran, dan data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses. Sedangkan ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya.

2. Karakteristik Nonfisik

Karakteristik non-fisik permukiman kumuh pada penelitian ini ditinjau dari



k. Ketiga aspek tersebut adalah kondisi ekonomi, sosial budaya, dan keadaan permukiman. Karakteristik ekonomi merupakan kondisi atau keadaan asli penelitian yang dilihat dari faktor ekonominya. Kondisi ekonomi

merupakan segala sesuatu yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kehidupannya mulai dari aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan jenis pekerjaan sehari-hari, penghasilan atau pendapatan yang didapatkan (Jailani, 2021). Menurut Saputra dan Munandar (2018), kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman kumuh dapat dilihat dari tingkat pendapatannya yang rendah dan umumnya bekerja sebagai pedagang dan sebagai buruh.

Karakteristik sosial budaya merupakan sebuah hubungan dan tatanan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di lokasi permukiman. Kehidupan sosial budaya penghuni permukiman kumuh dapat dilihat dari kegiatan keseharian penghuni permukiman kumuh di luar jam bekerja (Wadhanti, 2015). Watung dkk (2013) mengemukakan karakteristik sosial masyarakat disuatu wilayah meliputi berbagai aspek atau tingkatan seperti tingkat pendidikan.

2.2.2 Faktor Timbulnya Permukiman Kumuh

Penyebab munculnya permukiman kumuh menurut Fitri (2021) disebabkan oleh faktor fisik dan faktor sosial, ekonomi, serta budaya. Faktor fisik yaitu terdiri dari kepadatan bangunan, kondisi drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, persampahan, dan jaringan jalan. Sedangkan faktor sosial, ekonomi dan budaya terdiri dari tingkat pendidikan, migrasi masuk, pendapatan, jenis pekerjaan, beban tanggungan, dan *extended family system*. Beberapa faktor penyebab dari permukiman kumuh menurut Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tahun 2022 yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah urbanisasi yang cepat, perencanaan yang tidak efektif, kurangnya pilihan perumahan yang terjangkau bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kelangkaan pembiayaan perumahan, dan kemiskinan. UN-Habitat (2018) menjelaskan bahwa permukiman kumuh digambarkan sebagai lingkungan terdegradasi, memiliki bangunan tidak layak huni dan kepadatan tinggi, serta kurang terlayani infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Beberapa faktor pengaruh tumbuhnya permukiman kumuh menurut Aeny (2014), yaitu:



h of Density (Pertambahan Penduduk), adanya pertambahan penduduk dari kelahiran dan adanya penambahan jumlah keluarga, maka akan awa masalah baru, secara manusiawi mereka ingin menempati rumah

milik mereka sendiri. Semakin bertambah jumlah hunian yang ada di kawasan tersebut menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman;

2. *Urbanization* (Urbanisasi), adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Masyarakat urbanisasi yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota tentu memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

2.2.3 Aspek dan Kriteria Kekumuhan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) aspek kekumuhan dan 16 (enam belas) indikator yang akan menjadi acuan dalam penyusunan *baseline* dan penilaian tingkat kekumuhan.

Tabel 1 Aspek dan kriteria kekumuhan

No	Aspek	Indikator
1	Kondisi bangunan gedung	Ketidakteraturan bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
2	Kondisi jalan lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
3	Kondisi penyediaan air minum	Ketersediaan akses aman air minum Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
4	Kondisi drainase lingkungan	Ketidakkampuan mengalirkan limpasan air Ketidaksediaan Drainase Kualitas Konstruksi Drainase
5	Kondisi pengelolaan persampahan	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Standar Teknis
6	Kondisi proteksi kebakaran	Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sumber: Permen PUPR No. 14 Tahun 2018

2.2.4 Pendekatan Penanganan Permukiman Kumuh



Penanganan permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 akan dilakukan seperti:

Penanganan yang dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni
 3. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
 4. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh terdapat 3 pendekatan (Setijanti, 2010), yakni:

1. Pendekatan partisipatoris, yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya.
2. Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak



shkan.

katan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada peningkatan us lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum

tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral.

2.3 Pembangunan Permukiman Berkelanjutan

Pada dasarnya, belum ada indikator pasti dalam merumuskan konsep permukiman berkelanjutan. Tidak ada standar khusus yang berlaku dalam penanganan permukiman kumuh dengan prinsip permukiman berkelanjutan. Sehingga penulis mengumpulkan berbagai teori mengenai permukiman berkelanjutan.

Seperti yang diketahui, *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 tujuan global sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Satu di antaranya yaitu tujuan ke-11 dari SDGs ialah kota dan permukiman yang berkelanjutan yang menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tertulis juga pada SDGs tujuan ke-11 yaitu menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh (Bappenas, 2019). Berdasarkan hal itu, penelitian ini nantinya akan melihat dan mengacu kepada indikator-indikator dalam menentukan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. 4 indikator rumah layak huni berikut merupakan adaptasi Indonesia terhadap indikator SDGs tentang perumahan dan permukiman (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2020).

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*)

Pada ketahanan bangunan yang perlu dipenuhi ialah faktor keselamatan penghuni berupa struktur bawah atau pondasi, struktur tengah atau kolom dan balok, serta struktur atas bangunan. yang meliputi pemenuhan standar keandalan komponen



dan kualitas komponen non-struktur bangunan.

Struktur bangunan meliputi:

1. Struktur bangunan permanen

- b. kesesuaian dengan *building codes* yang berlaku
- c. informasi kebutuhan perbaikan besar pada hunian
- d. tidak berlokasi di sekitar limbah beracun
- e. tidak berlokasi di daerah rawan banjir
- f. tidak berlokasi di daerah bahaya seperti kereta, jalur penerbangan, di bawah kabel listrik, di bawah jembatan
- g. jenis material bangunan atap, dinding, lantai
- h. informasi kondisi bangunan yang perlu diperbaiki
- i. hunian tidak terletak di lereng curam
- j. lokasi hunian

2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*)

Secara global, terdapat lima kriteria dalam mengukur kecukupan luas bangunan tempat tinggal, yaitu:

- a. Jumlah orang per ruangan
- b. Luas lantai rumah bangunan yang dihuni
- c. Jumlah keluarga yang tinggal dalam bangunan rumah
- d. Jumlah orang dalam kamar tidur
- e. Jumlah anak di bawah 5 tahun dalam rumah bangunan

Kecukupan luas tempat tinggal meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minum luas per orang dihitung 7,2 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luas rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

3. Kelayakan akses sanitasi (*access to adequate sanitation*)

Kelayakan sanitasi meliputi fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan septic tank atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga itu. Sanitasi sendiri dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau dengan jarak yang terjangkau dan dapat melayani seluruh anggota



keluarga. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

4. Akses air minum (*access to improved water*)

Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang mudah terjangkau dari sisi waktu atau jarak tempuh. Memiliki akses air minum yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minumnya dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.

Soenarno, DR (2004) dalam Setyobudi (2018) mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan sektor perumahan dan permukiman akan mendominasi penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan terhadap empat hal utama, yaitu:

1. Pembangunan yang secara sosial dan kultural bisa diterima dan dipertanggungjawabkan;
2. Pembangunan yang secara politis dapat diterima;
3. Pembangunan yang layak secara ekonomis;
4. Pembangunan yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi lingkungan.

Dengan menjalankan keempat hal di atas secara konsisten dan konsekuen, maka pembangunan perumahan dan permukiman bisa berjalan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Menurut Santosa (2012), kondisi keberlanjutan kawasan permukiman yang menghasilkan indeks keberlanjutan dapat dinilai dari tiga dimensi, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Aspek ekologi mencakup keterpaduan ekosistem, sumberdaya alam, dan daya dukung lingkungan. Aspek ekonomi mencakup pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisiensi, sedangkan aspek sosial meliputi keadilan, kohesi sosial, keterpaduan kehidupan sosial, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada aspek ekologi yang dinilai adalah drainase (pengendalian banjir), air minum, sanitasi, persampahan, penambangan pasir dan batu, ahli fungsi lahan pertanian



produktif, DAS (Daerah Aliran Sungai) Cisadene, sanitasi lingkungan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada dimensi ekonomi atribut penilaian keberlanjutan permukiman yang digunakan ialah penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, tingkat penghasilan penghuni, nilai ekonomi perumahan, nilai ekonomi lahan, keuntungan/profit, perkembangan sarana ekonomi (10 tahun terakhir). Pada dimensi sosial, indikator penilaian permukiman berkelanjutan yang digunakan ialah tingkat pendidikan penghuni, konflik sosial, kohesi sosial, kriminalitas, prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, perkembangan penduduk, fasilitas umum, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, permukiman berkelanjutan yang diungkapkan dalam teori permukiman oleh Doxiadis (1968) dalam Hamidah (2016) meliputi lima komponen dasar yaitu alam, lingkungan, jejaring, manusia, dan masyarakat. Teori itu digunakan oleh UN-Habitat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagai pedoman perbaikan permukiman.

Permukiman yang berkelanjutan harus memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara, peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi sumber daya yang terkendali dengan baik (Chaidir, 2014). Budihardjo (2009) menyatakan, kemampuan berkelanjutan permukiman didasarkan pada pengembangan dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek ekologi (lingkungan atau sumberdaya alam);
2. Aspek ekonomi (keuangan atau sumberdaya finansial);
3. Aspek sosial budaya (rakyat atau sumberdaya manusia);
4. Aspek infrastruktur (fasilitas produktif atau sumberdaya buatan);
5. Aspek kelembagaan (institusi atau sumberdaya kelembagaan).

Penerapan aspek berkelanjutan dalam penanganan permukiman kumuh menggunakan beberapa indikator penilaian (Rama, 2018). Penilaian tersebut dinilai dari empat aspek berkelanjutan yang dapat dilihat pada Tabel 2.



Penerapan aspek berkelanjutan dalam penanganan permukiman kumuh

Aspek	Parameter
Lingkungan	1. Kesesuaian penanganan dengan karakteristik lingkungan

Aspek	Parameter
Aspek sosial	2. Pencegahan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan
	1. Adanya partisipasi/keterlibatan aktif Masyarakat dalam pelaksanaan program
	2. Inklusi sosial/keterlibatan yang terbuka bagi seluruh program
	3. Terbentuknya kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan dan infrastruktur terbangun
Aspek ekonomi	4. adanya peningkatan pengetahuan Masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh
	1. Adanya peningkatan keterampilan dan ekonomi Masyarakat
	2. Adanya penciptaan lapangan kerja
	3. Tersedianya dana pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun
Aspek lembaga	1. Adanya lembaga tetap serta mempunyai struktur dan pembagian tugas yang jelas
	2. Adanya lembaga yang responsive
	3. Adanya lembaga yang mempunyai kemampuan dalam penanganan permukiman

Sumber: Rama, 2018

Di sisi lain, Habitat-UN (2022) mengemukakan bahwa definisi pembangunan permukiman berkelanjutan mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Penggunaan lahan berkelanjutan;
2. Pemberantasan kemiskinan;
3. Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan integrasi sosial;
4. Populasi dan pengembangan permukiman penduduk yang berkelanjutan;
5. Lingkungan yang berkelanjutan, sehat, dan permukiman layak huni;
6. Penggunaan energi terbarukan dan berkelanjutan;
7. Sistem komunikasi dan transportasi berkelanjutan;
8. Konservasi dan rehabilitasi warisan sejarah dan budaya;
9. Meningkatkan ekonomi di perkotaan;
10. Keseimbangan pembangunan antara daerah permukiman dan pedesaan;
11. Mencegah terjadinya bencana, melakukan mitigasi, kesiapsiagaan dan kemampuan rehabilitasi pascabencana;

Pada dasarnya, konsep permukiman berkelanjutan dijabarkan dan digambarkan dalam berbagai konsep dan metode. Adapun tinjauan konsep permukiman berkelanjutan dari berbagai sumber literatur dapat dilihat pada Tabel



Tabel 3 Konsep permukiman berkelanjutan dari berbagai literatur

No	Penulis	Judul	Indikator				Sumber
			Ekonomi	Sosial Budaya	Lingkungan	Kelembagaan	
1	Chaidir A & Murtini TW (2014)	Keberlanjutan Permukiman Rawa Desa Baru di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pencaharian • Pendapatan masyarakat • Penduduk miskin • Jumlah pengangguran • Sarana perekonomian • Biaya konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Lama tinggal • Sistem kemasyarakatan • Pelayanan fasilitas pendidikan • Pelayanan fasilitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan • Status kepemilikan lahan • Sistem sanitasi • Frekuensi banjir • Adaptasi terhadap lingkungan • Tingkat kepedulian terhadap lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan pemerintah desa • Keberadaan lembaga sosial • Keberadaan kelompok karang taruna • Keberadaan lembaga keuangan mikro 	<i>Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota</i> , vol. 10, no. 1, pp. 59-69, Mar. 2014. https://doi.org/10.14710/pwk.v10i1.7633
2	Santosa NS, dkk (2012)	<i>Sustainable Analysis of Cisauk Urbanized Settlement at Cisadane River Basin</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Peningkatan pendapatan asli daerah • 3Tingkat penghasilan penghuni • Nilai ekonomi perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan penghuni • Konflik sosial • Kohesi sosial • Kriminalitas • Prasarana pendidikan • Prasarana kesehatan • Perkembangan penduduk • Fasilitas umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Drainase (pengendalian banjir) • Air minum (kualitas, kuantitas, waktu) • Jalan akses (kualitas) • Persampahan (pengelolaan) • Penambangan pasir dan batu • Alih fungsi lahan pertanian 	-	<i>Jurnal Permukiman</i> , 7(2), 88–94. 2012. https://doi.org/10.31815/jp.2012.7



No	Penulis	Judul	Indikator			Sumber	
			Ekonomi	Sosial Budaya	Lingkungan		Kelembagaan
			<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ekonomi lahan • Keuntungan /profit • Perkembangan sarana ekonomi (10 tahun terakhir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • produktif (luasan dan waktu) • DAS Cisadene • Sanitasi lingkungan • Ruang Terbuka Hijau (luasan) 		
3	Yunita IM, dkk (2021)	Tingkat Keberlanjutan Permukiman Kampung Warna-Warni, Kelurahan Jodipan, Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan penduduk • Lembaga ekonomi mikro • Angkatan kerja • Peluang usaha • Perlindungan sosial • Pengeluaran penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Karang taruna • Pengurus kampung • Kepuasan pelayanan KB • Pelayanan pendidikan SMA • Pelayanan pendidikan SMP • Pelayanan pendidikan SD • Pelayanan kesehatan • Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • RTH • Sanitasi • Air bersih • Kepemilikan tempat sampah • Kondisi jalan • Drainase • Penerangan Jalan Umum • Pengolahan sampah 	-	<i>Jurnal Perencanaan dan Wilayah Kota Universitas Brawijaya. Vol 10 No. 1. 2021</i>



2.4 Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS)

Metode pengolahan dan analisis data terkait dengan evaluasi keberlanjutan permukiman kumuh menggunakan metode penilaian cepat multi disiplin, yaitu analisis MDS (*Multidimensional Scaling*) dengan pendekatan *Rapsettlement* yang merupakan penyesuaian dari *Rapfish*. Teknik *Rapsettlement* merupakan metode multi disiplin yang digunakan untuk mengevaluasi perbandingan permukiman berkelanjutan, dengan mempertimbangkan sejumlah atribut yang banyak namun mudah dinilai (Santosa, NS, dkk., 2012). Dalam menerapkan pendekatan *Rapfish*, *Rapsettlement* menggunakan semua prinsip yang terdapat dalam metode *Rapfish* menurut Mahidah, dkk (2019), yaitu:

1. Sebuah teknik evaluasi yang cepat untuk menilai status keberlanjutan suatu objek berdasarkan sejumlah atribut;
2. Atribut-atribut dapat diredifinisi atau diganti sesuai informasi yang tersedia
3. Metode pengambilan keputusan multi kriteria berdasarkan skala multi dimensi (MDS)
4. Menggunakan metode ordinasi untuk menentukan status keberlanjutan

Beberapa penelitian lain yang telah menggunakan analisis MDS dengan pendekatan *Rapfish* untuk menentukan nilai keberlanjutan antara lain Chaidir dan Murtini (2014) dalam penelitian “Keberlanjutan Permukiman Rawa Desa Baru di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan” dengan menggunakan dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, infrastruktur dan kelembagaan. Penelitian oleh Santosa NS, dkk (2012) dengan judul “*Sustainable Analysis of Cisauk Urbanized Settlement at Cisadane River Basin*” dengan menggunakan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial. Penelitian oleh Yunita IM, dkk, 2021 terkait “Tingkat Keberlanjutan Permukiman Kampung Warna-Warni, Kelurahan Jodipan, Kota Malang” dengan menggunakan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tahap-tahap dalam mengaplikasikan MDS menurut Kavanagh dan Pitcher (2004), yaitu:



1. Memilih atribut dari setiap dimensi permukiman berkelanjutan
 2. Menentukan bobot masing-masing atribut menurut parameter. Penilaian berupa skor menurut parameter atau kuesioner dengan rentang skor baik – buruk dalam skala ordinal

3. Melakukan analisis multidimensi untuk menentukan status keberlanjutan. Indeks penilaian status keberlanjutan menurut Kavanagh dan Pitcher (2004) dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4 Kategori tingkat keberlanjutan

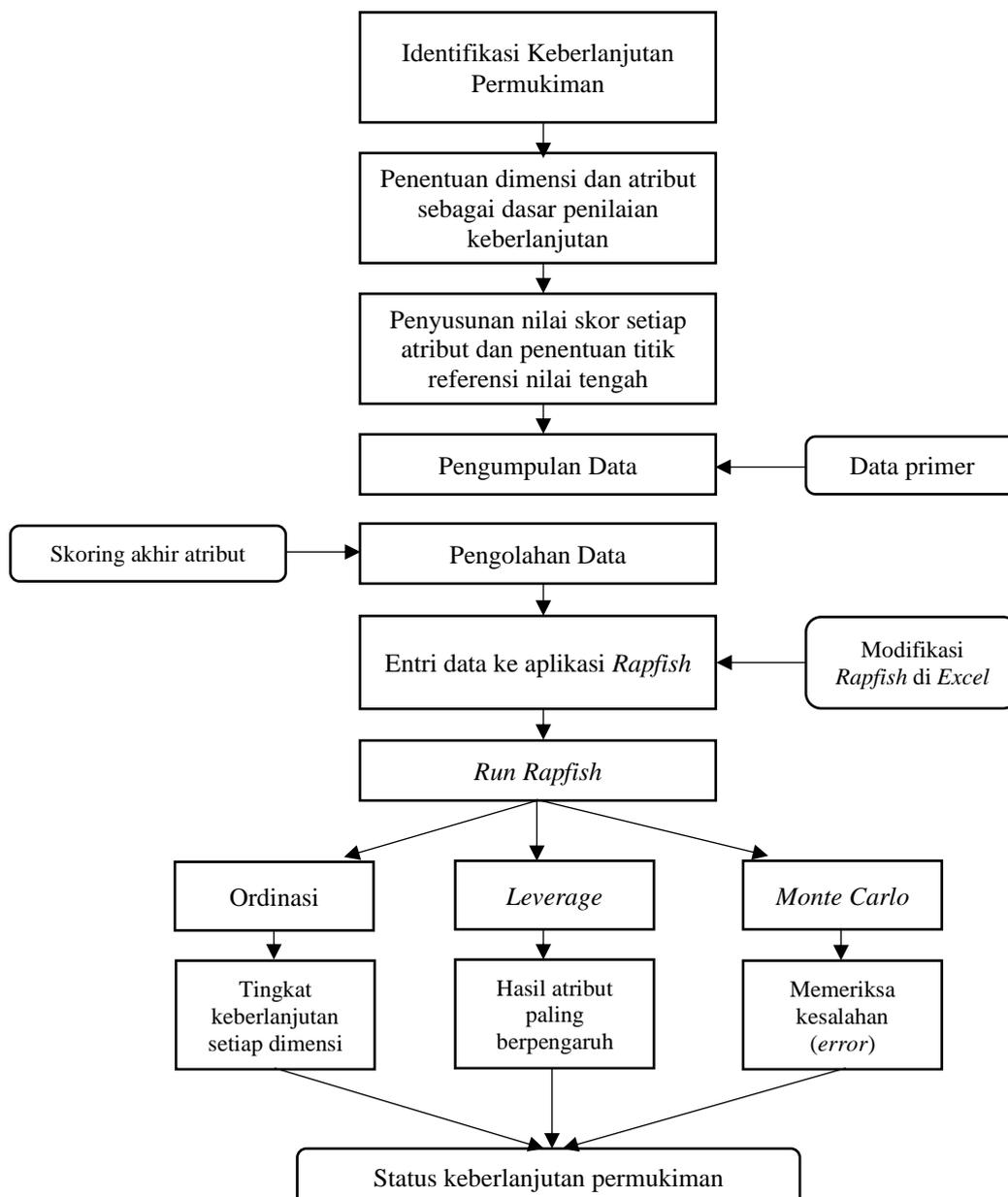
No.	Nilai Indeks	Kategori
1	0,00-24,99	Tidak Berkelanjutan
2	25,00-49,99	Kurang Berkelanjutan
3	50,00-74,99	Cukup Berkelanjutan
4	75,00-100,00	Sangat Berkelanjutan

Sumber: Kavanagh dan Pitcher, 2004

4. Melakukan simulasi Monte Carlo untuk mengurangi ketidaktepatan dalam proses analisis dengan tingkat kepercayaan 95%. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk mengestimasi pengaruh kesalahan. Output dari simulasi Monte Carlo disebut indeks Monte Carlo, dan jika perbedaannya dengan indeks MDS kecil, itu menunjukkan:
- Kesalahan pembuatan skor dalam masing-masing atribut relatif kecil
 - Variasi pemberian skor akibat perbedaan opini relatif kecil
 - Proses analisis stabil
 - Kesalahan pemasukan data dan data yang hilang dapat dihindari
5. Menggunakan analisis leverage untuk mengidentifikasi atribut yang sensitif terhadap perubahan status keberlanjutan, yang ditetapkan berdasarkan persentase perubahan Root Mean Square (RMS). Semakin tinggi nilainya, semakin besar peran atribut tersebut.
6. Melakukan analisis nilai stress untuk menilai ketidaksesuaian (lack of fit) MDS. Nilai stress yang dapat diterima adalah kurang dari 0,25 (Kavanagh dan Pitcher, 2004).
7. Menggunakan analisis koefisien determinasi (RSQ) untuk menentukan penambahan atribut. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan jumlah atribut yang cukup akurat.

Untuk lebih jelasnya, tahapan analisis MDS dengan *Rapsettlement* dapat dilihat pada





Gambar 1 Tahap analisis menggunakan MDS

Nawangarsi, 2022, dimodifikasi oleh Penulis, 2023

Pada Gambar 1, dapat dilihat tahapan analisis menggunakan MDS yang dilakukan. Dimulai dari penentuan dimensi dan atribut sebagai dasar penilaian, penyusunan nilai skor setiap atribut, penentuan titik referensi nilai tengah, pengumpulan data, pengolahan data ke aplikasi, menjalankan program, hingga menghasilkan hasil analisis keberlanjutan setiap dimensi, hasil atribut yang paling berpengaruh, dan memeriksa kesalahan (*error*). Sehingga dihasilkan status keberlanjutan permukiman yang



2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 5 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Chalimatus Sakdiah dan Dian Rahmawati (2020)	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip SDGs	Merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh sesuai dengan prinsip SDGs	<ul style="list-style-type: none"> •Kondisi fisik dan legalitas bangunan •Kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman •Kondisi sosial dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> •Analisis kebijakan tata ruang bangunan •Analisis statistik deskriptif •Analisis triangulasi 	Menentukan strategi penanganan permukiman kumuh berdasarkan prinsip SDGs	Penelitian sebelumnya memiliki lokasi penelitian pada Daerah Aliran Sungai, dan penentuan arahan penanganan menggunakan teknik analisis triangulasi.	Merumuskan berbagai strategi sesuai dengan karakteristik dari masing-masing variable mencakup pada kawasan kumuh legal dan illegal.	Jurnal Teknik Its Vol. 9, No. 1, (2020) ISSN: 2337-3539
2	Nanang Sofwan Santosa (2012)	Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Pinggiran Metropolitan DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui dinamika perkembangan kawasan permukiman • Mengetahui tingkat keberlanjutan kawasan permukiman • Mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Akeptasi social • Kelayakan ekonomi • Tata air • Guna lahan • Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Soft system methodology</i> seperti <i>Multidimensional Scaling (MDS)</i> • Analisis prospektif • <i>Analysis Hierarchy Process (AHP)</i> 	Membahas pengembangan permukiman dengan aspek keberlanjutan	Penelitian sebelumnya menggunakan analisis AHP dalam menentukan arahan kebijakan	Mengetahui arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman ditinjau dari faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan.	Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB)



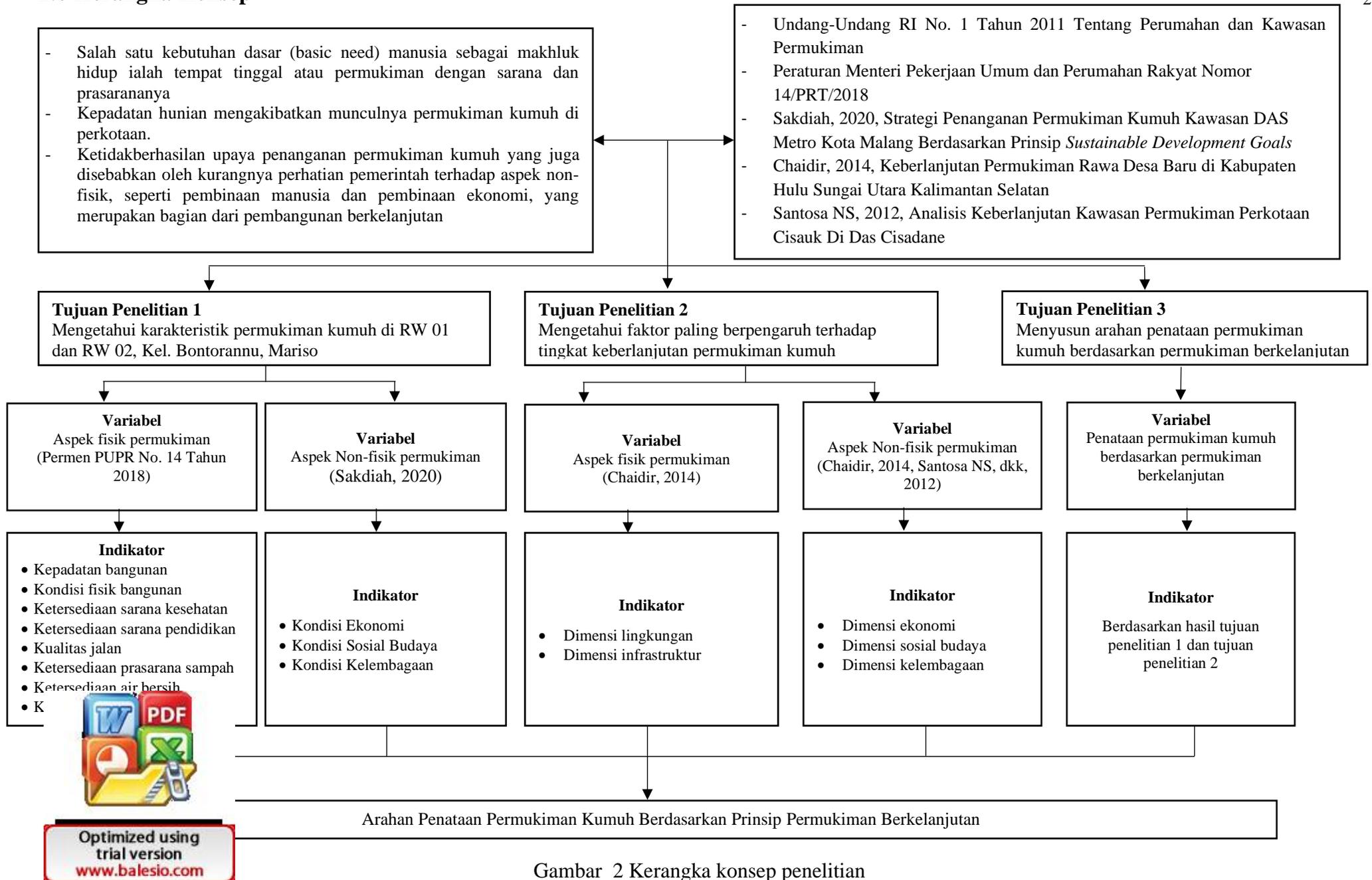
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
			keberlanjutan pengembangan permukiman • Menyusun arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan						
3	Wulfram I. Ervianto dan Sushardjanti Felasari (2019)	Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan	Merumuskan pengelolaan permukiman didasarkan pada pemanfaatan tata ruang dan disain bangunan yang mengakomodasi aspek lingkungan.	Kualitas bangunan, kepadatan bangunan, penghasilan penduduk, sarana dan prasarana, kepemilikan lahan bangunan, ketersediaan bangunan, tingkat pengetahuan, tingkat pendudukan, kepadatan penduduk, kualitas sarana dan prasarana, pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis deksriptif kualitatif • Analisis deksriptif kuantitatif 	Pendekatan yang digunakan didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan.	Penelitian sebelumnya tidak menghasilkan arahan penanganan permukiman kumuh.	Penelitian inii menghasilkan beberapa prinsip pengusulan yaitu mengakomodasi tentang tata guna lahan, mobilitas penduduk, pemanfaatan energi terbarukan, meningkatkan ekonomi perkotaan, pembangunan sosial, dan aksesibilitas.	Jurnal Spektran Vol. 7, No. 2, Juli 2019, Hal. 178 - 186 e-ISSN: 2302-2590



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				tanah, tingkat arus migrasi.					
4	Indah Mei Yunita, Nyoman Suluh Wijaya, Surjono (2021)	Tingkat Keberlanjutan Permukiman Kampung Warna-Warni, Kelurahan Jodipan, Kota Malang	Mengidentifikasi tingkat keberlanjutan serta mendefinisikan atribut-atribut yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan	Variabel sosial, ekonomi, dan lingkungan	<i>Multi Dimensional Scalling</i> (MDS)	Mengidentifikasi tingkat keberlanjutan lokasi penelitian	Keluaran hasil penelitian tidak berupa arahan penataan	Tingkat keberlanjutan kampung warna-warni secara keseluruhan berada pada tingkat cukup berkelanjutan.	Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Vol 10, No 1 2021, pp. 145-156.



2.6 Kerangka Konsep



Gambar 2 Kerangka konsep penelitian